

## Kasus Bansos Terhambat Audit BPK

PONTIANAK. Berkas penanganan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar senilai Rp 22,14 miliar tak kunjung masuk Kejaksaan. Polda Kalbar beralasan audit BPK yang menghambat untuk melanjutkan proses penanganannya lebih lanjut.

"Kalau tersangka dan calon tersangka tidak masalah. Su-

dah menerima petunjuk dari BPK. Tapi hambatannya hasil audit BPK," kata Direskrim Khusus Polda Kalbar, Wirdhan Denny ketika ditanya wartawan pada acara press release evaluasi situasi Kamtibmas 2011 di Mapolda Kalbar, Jumat (30/12).

Wirdhan mengungkapkan, sekarang ini ada 35 kasus

korupsi yang ditangani jajaran Polda Kalbar. Dari jumlah tersebut 10 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P21. "Untuk 2012 target masih sama yakni lima kasus korupsi untuk polda, dan dua kasus korupsi untuk Polres di Kalbar," tambahnya.

Mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit

regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO).

■ Halaman 7

## Kasus Bansos.....dari halaman 1

Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya

diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra PON sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran

keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Kasus korupsi Bansos Pemprov Kalbar yang ditangani Polda Kalbar itu sudah menjerat satu tersangka. Kepolisian sebenarnya telah mengantongi sejumlah nama saksi dan yang telah mengarah kepada tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

Namun, tanpa adanya dasar audit dari BPK, pihak kepolisian tidak berani menetapkan tersangka. (jul)